

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keterlibatan penyedia barang/jasa pemerintah dan masyarakat sebagai pelaksana swakelola menunjukkan adanya kolaborasi dalam proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta, namun kolaborasi yang terjadi belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip dasar dari konsep *collaborative governance*. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak didasari oleh konsep *collaborative governance* akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut.

Hambatan-hambatan atau kendala-kendala konsep *collaborative governance* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti keterbatasan sumber daya, adanya benturan kepentingan, komunikasi yang kurang efektif serta perencanaan yang kurang terintegrasi atau matang.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala di atas yaitu meningkatkan sumber daya, membuat perencanaan yang terintegrasi, membangun komunikasi yang efektif, meminimalisir benturan kepentingan, pendistribusian hak dan kewajiban para pihak secara proporsional, memperkuat kepercayaan dan komitmen bersama.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini, saraa dari penulis, sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Eksekutif agar menyempurnakan lagi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar mencerminkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip dasar dari konsep *collaborative governance*.
2. Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), agar menyempurnakan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP terkait pedoman teknis dalam pengadaan .barang/jasa pemerintah.
3. Bagi pemerintah, penyedia barang/jasa dan masyarakat sebagai pelaksana swakelola sebagai sebuah tim kolaborasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah agar mampu menerapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip dasar dari konsep *collaborative governance* sehingga dapat mewujudkan pengadaan barang/jasa yang efektif.
4. Bagi UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta, agar mampu mengatasi berbagai kendala dalam penerapan konsep *collaborative governance* pelaksanaan kontrak penagdaan barang/jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfiandri, Dhani Akbar & Khairul Ikhsan. (2019). *Collaborative Governance; Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan dalam Dunia Investasi*. Tanjungpinang: UMRAHN Press.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djumara, Noorsyamsa. (2008). *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Lembaga Administrasi Negara-RI. Jakarta.
- Hasanudin, Rahman. (2003). *Contract Drafting*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Ilyas, Anshori & Dkk. (2021). *Hukum Publik*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Kurniadi. (2020). *Collaborative Governance dalam Penyediaan Infrastruktur*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Marbun, Rocky. (2010). *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Noor, Muhammad, Falih Suaedi, & Antun Mardiyanta. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktek*. Yogyakarta: Bildung.
- Purwanti, Nurul Dwi. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. *Center for Policy & Management Studies FISIPOL UGM*. Yogyakarta
- Purwosusilo, H. (2017). *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, Choirul. (2020). *Konsep, Pengertian Dan Tujuan Kolaborasi*. Tangerang Selatan: Pustaka Universitas Terbuka.

- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Sentanu, I Gede E., Yuniawati A. Tirani, Gadang S. Pradono. (2023). *Kolaborasi dan Analisis Stakeholder: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Sidik, Salim H. (2019). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Pengantar Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solikin, H. Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: SMART Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Tjandra, Riawan. (2022). *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*. Jakarta: Kencana.
- Wibowo, Richo Andi (ed). (2021). *KONTRAK PEMERINTAH: Konsep, Ragam, Perkembangan, Regulasi dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Winana, Agus. (2023). *Collaborative Governance: Teori & Praktik Dalam Perspektif Kebijakan Pertahanan*. Taronggong Kidul: CV. Aksara Global Akademia.

Jurnal

- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory* Oxford University Press Halaman 544.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. 2020. *Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law)*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14 Nomor 2 Halaman 364.
- Elianda, Yunita & Dian Eka Rahmawati, 2020, “*Collaborative Governance in HIV and AIDS Prevention in Sleman District 2018*”, *Journal of Government and Civil Society*, Volume 4 Nomor 1 April 2020, hlm. 104-105.

Muskibah, M & L. N. Hidayat. 2020. Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia. *Refleksi Hukum* Volume 4 Nomor 2 Halaman 176.

Sari, Melani. 2020. Peran Notaris Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689 K/PDT/2016). *Indonesian Notary*, Volume 2 Artikel 11 Halaman 214.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543)

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593)

Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 21)

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 117)

Internet.

Gunawan, Johannes & Bernadette M. Waluyo. Perjanjian Baku Masalah dan Solusi.

<https://e-journal.uajy.ac.id/24295/>, diakses pada 5 Mei 2024.

Waardenburg, Maurits dkk. *Paradoxes of collaborative governance: investigating the real-life dynamics of multiagency collaborations using a quasi-experimental action-research approach.*

<https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1599056> , diakses pada 10 Juni 2024.

Papandayan, Annafi & Muhammad Abduh. Menuju Infrastruktur Berkualitas: Memperkuat Budaya Kolaborasi dalam Pembiayaan Proyek.

<https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1214-1744/umum/kajian-opini-publik/menuju-infrastruktur-berkualitas-memperkuat-budaya-kolaborasi-dalam-pembiayaan-proyek>, diakses pada 14 Maret 2024

